# KEWENANGANAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

#### **Disusun Oleh:**

#### AGUNG JOSPRIADY 1710611109

Tugas Akhir Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA TAHUN 2021



#### UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR JUDUL:

# KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

#### **AGUNG JOSPRIADY**

#### 1710611109

Tugas akhir ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

#### Jakarta, 03 Februari 2021

Mengetahui,

Dekan

Halim, M.Ag) NIP 1967/6081994031005 198701022019031006 Kaprodi

(Taupiqurrahman, S.H., M.Kn)

NIP.

Pembimbing

1

(Robinsar Marbun, S.H., M.H) NIP. 196306151985091002



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

#### **PENGESAHAN**

Artikel Jurnal diajukan oleh:

Nama : Agung Jospriady

NIM : 1710611109

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Telah berhasil dipertahakan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.

Ketua

M. Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H, M.H.

dul Halim, M.Ag)

Anggota I

Dekan

PENDIDIKAN DAN

MAKULTAS HUKU

Robinsar Marbun, S.H., M.H.

Anggota II

(Taupiqurrahman, S.H., M.Kn) Kaprodi

Ditetapkan di

: Jakarta

Tanggal Ujian

: 03 Februari 2021

#### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk artikel jurnal yang telah Submit/LoA/Publish adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis Pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan artikel artikel jurnal tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Agung Jospriady

NIM : 1710611109

Tanggal : 15 Februari 2021

668AJX04976507

Tanda Tangan:

#### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR<del>/ARTIKEL JURNAL/TESIS</del> UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

SEBAGAI CIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA, SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

Nama : Agung Jospriady

NPM : 1710611109

Fakultas : Hukum

Program Studi: S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya :TugasAkhir/Artikel Jurnal/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Jakarta, 5 Februari 2021

Agung Jospriady

#### **ABSTRAK**

### KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

#### **Agung Jospriady**

Penetapan Bencana Covid-19 sebagai Bencana Nasional melalui Kepres Nomor 11 Tahun 2020 merupakan respon Pemerintah Pusat dalam menghadapi Pandemi global yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization). Pandemi Covid-19 berdampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sehingga Pemerintah Pusat memilih PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar dan penerapan protocol kesehatan sebagai upaya pengendalian Covid-19. Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada daerah suatu bentuk Otonomi Daerah, memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan pandemi global ini. Pembagian Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan terpusatnya pengaturan dalam penanganan pandemi covid-19 menjadi diskursus masyarakat. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggambarkan permasalahan yang dihadapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi covid-19. Penelitian ini memberikan gambaran otonomi daerah dalam penanganan pandemi covid-19. Penelitian mengidentifikasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadi penting demi terciptanya hubungan yang harmonis.

Kata Kunci: Kewenangan, Otonomi Daerah, Pandemi Covid-19

#### **ABSTRACT**

### THE AUTHORITY OF CENTRAL GOVERNMENT AND LOCAL GOVERNMENT TO HANDLING COVID-19 PANDEMIC

#### Agung Jospriady

The determination of the Covid-19 as a National Disaster through Presidential Decree Nomor 12 of 2020 is the response of the global pandemic set by the World Health Organization. Indonesia as a Unitary State based on Regional Autonomy, has its own challenges in handling this global pandemic. The division of the Authority of the Regional and the Central Government becomes the discourse of the community. Some local governments take policies in handling in their regions. These policies are often inconsistent with the command of the Central Government. For the sake of creating a good handling of the global pandemic, the Regional and Central Government must synergize. This study provides an overview of regional autonomy in handling the Covid-19 pandemic. The research identifies that the authority between the central and regional governments is important for the creation of a harmonious relationship.

Keywords: Authority, Autonomy Regional, Covid-19 Pandemic

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala karunia-Nya sehingga Artikel Jurnal ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2020 ini, dengan judul "Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19."

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

- 1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3. Kedua orang tua Penulis yang telah mendukung penulis dalam mengerjakan tugas akhir dengan memberikan dukungan moril dan materil.
- 4. Rekan-rekan pelayanan penulis, baik dalam komunitas rohani maupun gereja.
- 5. Pembimbing rohani penulis yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
- 6. Bapak Robinsar Marbun, S.H., M.H sebagai pembimbing tugas akhir penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
- 7. Sivitas akademika Fakultas Hukum UPNVJ yang turut membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 8. Fadly Ikhsan Pradana, teman saya satu konsentrasi, satu local, satu kelas namun berbeda pendapat. Yang telah menjadi teman dalam bertukar pendapat penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir
- Teman-teman di Unit Peradilan Semu angkatan 2017 yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir penulis dan juga berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir.
- 10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta terutama mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Unit Peradilan Semu, atas *support* dan doanya yang tulus.
- 11. Diri penulis sendiri karena telah berjuang dan berhasil mencapai tahap ini dan tidak menyerah sehingga skripsi tersebut dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan secara khusus yaitu bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 16 Februari 2021

Agung Jospriady

#### **DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUANi
PENGESAHANiii
PERNYATAAN ORISINALITASv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASIvi
ABSTRAKvii
KATA PENGANTARix
DAFTAR ISIxi
RIWAYAT HIDUPxii
BAB I1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah3
C. Ruang Lingkup Penelitian3
D. Tujuan dan Manfaat Penelitan3
BAB II
A. Literature Review5
B. Metode Penelitian 6
BAB III9
1. Disparitas Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19
A. Kewenangan Daerah dalam Penetapan Karantina
Kesehatan (Pembatasan Sosial Berskala Besar 11
B. Pedoman Protokol Kesehatan12
2. Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 14
D. PENUTUP17
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN22